

**HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK  
*CORPORATE GOVERNANCE* DAN  
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN**

**(Studi Empiris pada Perusahaan *High Profile* yang Terdaftar di  
Bursa Efek Indonesia)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**FITRI HANDAYANI  
NIM. C2C007044**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2011**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Fitri Handayani  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007044  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **HUBUNGAN ANTARA  
KARAKTERISTIK *CORPORATE  
GOVERNANCE* DAN PENGUNGKAPAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN (Studi Empiris pada  
Perusahaan *High Profile* yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia)**

Dosen Pembimbing : Shiddiq Nur Rahardjo, SE., M.Si., Akt.

Semarang, 1 Februari 2011

Dosen Pembimbing,



(Shiddiq Nur Rahardja, SE., M.Si., Akt.)

NIP. 19720511 200012 1001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Fitri Handayani  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007044  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **HUBUNGAN ANTARA  
KARAKTERISTIK *CORPORATE  
GOVERNANCE* DAN PENGUNGKAPAN  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN (Studi Empiris pada  
Perusahaan *High Profile* yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2 Maret 2011**

Tim Penguji

1. Shiddiq Nur Rahardja, SE., M.Si., Akt. (.....)
2. Dr. H. Sugeng Pamudji, M.Si., Akt. (.....)
3. H. Warsito Kawedar, SE., M.Si., Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fitri Handayani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Hubungan antara Karakteristik *Corporate Governance* dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan *High-Profile* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1 Februari 2011

Yang membuat pernyataan,

(Fitri Handayani)

NIM. C2C007044

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Q.S. Ar-Ra'du ayat 11

*“Bagi Manusia ada (malaikat) mengikutinya bergantian di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain-Nya.”*

*“Man Jadda Wajada (Siapa yang Bersungguh-sungguh pasti akan sukses)”*

*“Keep our dreams alive .. and we will survive” (Donny Dhirgantoro)*

### *Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:*

- ✓ *Atok dan Almh. Nenek tercinta*
- ✓ *Orang Tuaku, terutama Mamaku Tersayang. I love u, mom*
- ✓ *Adekku yang cantik, Azaria Rahmadianingrum*
- ✓ *Ibu Keduaku (Bu Mimin), Tante Santi, Tante Atin, Tante Eka, Om Burhan, Om Tasroh, Nia dan Satar*
- ✓ *Sahabatku yang telah tiada, almh. Santi Nurkhotimah*

## ***ABSTRACT***

The aim of this research is to prove the relationship between certain characteristics of corporate governance on the disclosure of corporate social responsibility on companies listed in Indonesia Stock Exchange. Disclosure of corporate social responsibility by using the GRI indicators (Global Reporting Initiatives), which consists of six categories: economic, environmental, labor practices and decent work, human rights, society and product responsibility. Review of previous studies show the diversity of results. Therefore, this research attempts to develop a previous study by using the six characteristics of corporate governance as independent variables. They are size of the board of commissioners, independent commissioners, proportion of women the board of commissioners, audit committee size, independent audit committees, and institutional ownership.

The population of this research is a high profile companies listed (go public) at the Indonesian Stock Exchange. The selection of this sample using purposive sampling method. Based on purposive sampling method, sample size of this research is 79 companies. Analysis tool to test the hypothesis that multiple regression analysis by using SPSS for Windows 13.0.

The results of this research indicate that only the size of the audit committee have a positive and significant effect on the disclosure of corporate social responsibility; but the size of the board of commissioners, independent commissioners, the proportion of women in the board of commissioners, independent audit committee, and institutional ownership does not have a significant influence. These results of this research generally coincide with the previous research findings on disclosure of corporate social responsibility.

**Keywords:** Disclosure of Corporate Social Responsibility, Size of The Board of Commissioners, Independent Commissioners, Proportion of Women in The Board of Commissioners, Audit Committee Size, Independent Audit Committees, Institutional Ownership

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan antara beberapa karakteristik *corporate governance* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*) yang terdiri dari enam kategori yaitu ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Tinjauan mengenai penelitian sebelumnya menunjukkan keanekaragaman hasil. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan enam karakteristik *corporate governance* sebagai variabel independen. Enam variabel independen tersebut yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran komite audit, komite audit independen, dan kepemilikan institusional.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan *high profile* yang tercatat (*go public*) di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode *purposive sampling*, jumlah sampel penelitian ini adalah 79 perusahaan. Alat analisis untuk menguji hipotesis yaitu analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS *for Windows* 13.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukuran komite audit yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan; sedangkan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, komite audit independen, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian ini secara umum sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kata kunci: Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran komite audit, komite audit independen, kepemilikan institusional

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Hubungan antara Karakteristik *Corporate Governance* dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan *High Profile* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Penulis mengharapkan skripsi ini berguna sebagai salah satu literatur yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun demikian, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Skripsi ini masih sederhana, sesederhana pemikiran penulis.

Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Atok dan Almh. Nenek tercinta, terima kasih atas cinta dan nasihatnya untuk cucu atok dan nenek yang nakal ini.
2. Orang tua saya, terutama untuk Mama tersayang, terima kasih atas limpahan cinta dan segala pengorbanan yang telah mama berikan untuk penulis.
3. Adek saya, Azaria Rahmadianingrum, senyum dan tangismu yang membuat penulis berusaha menjadi kakak yang terbaik.
4. Bu Mimin (Ibu Keduaku), Tante Santi, Om Burhan, Satar, Tante Atin, Tante Eka, Om Tasroh, dan Nia, terima kasih atas dukungan, semangat, dan bimbingan yang diberikan untuk penulis.
5. Rektor UNDIP (Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES.)

6. Dekan FE UNDIP (Prof. Dr. Muhammad Natsir, Msi., Akt.)
7. Ketua Jurusan Akuntansi FE UNDIP (Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, Msi., Akt.), yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Dosen Pembimbing saya; Shiddiq Nur Rahardjo, SE., M.Si., Akt.; yang selalu berusaha untuk meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, dukungan, bimbingan dan bantuan kepada penulis.
9. Dosen Wali saya; Surya Rahardja, SE., Msi., Akt.; yang memberikan kemudahan dan nasehat kepada penulis selama menempuh masa studi.
10. Para Staf Pengajar FE UNDIP, yang telah memberikan ilmu, pengalaman berharga, serta bimbingan hingga penulis berhasil menyelesaikan studi.
11. Seluruh Karyawan FE UNDIP, yang telah membantu dan memudahkan segala urusan penulis selama menempuh masa studi.
12. Pihak BEI *Corner* UNDIP (mas Azis) yang memberikan bantuan saat penelitian.
13. Para Sahabat saya (almh. Santi Nurkhotimah, Mutiara Tresna P., Nurina Rahmadika, Hari Suryono W., Dian Eka A., Lita Chintia, Astrid Aditika, Retsyi Firda, Vita Oktaviana, Kartika Nugraheni, Devi Permatasari, Anissa Miftakhulia, Arumwati, dan Prasetya Yulian N.). Terima kasih telah memberikan kepada penulis suatu arti persahabatan yang tulus.
14. Para Senior saya (Suparno (Teknik Mesin '06), Mastur M. (IESP '06), Haris P. (IESP '06), Aulia Z. (Akt '06), Marcel (Akt '05), dan Luthfan W. (Man '05)) dan para junior saya (M. Iqbal N. (Man '08), dan Miratul A. (Akt '08)), yang telah memberikan semangat kepada penulis.

15. Teman-teman KKN Kuningan Semarang Utara saya (Marnisa, Bunga, Sona, Arni, Yunita, Anggit, Mega, Dyah, Tony, Faris, Dita, Budi, Helda, Ganjar). Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis.
16. Teman-teman Akuntansi S1 Reguler I 2007, yang telah memberikan arti pertemanan kepada penulis.
17. Kompi, yang telah menemani penulis siang dan malam tanpa rasa lelah.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan barokah dan pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama masa studi dan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 1 Februari 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	12
1.4 Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	14
2.1 Landasan Teori .....	14

2.1.1	Teori <i>Stakeholder (Stakeholder Theory)</i> .....	14
2.1.2	Teori Legitimasi ( <i>Legitimacy Theory</i> ) .....	17
2.1.3	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	21
2.1.4	Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	24
2.1.5	<i>Corporate Governance</i> .....	29
2.1.6	Karakteristik <i>Corporate Governance</i> .....	33
2.1.6.1	Ukuran Dewan Komisaris .....	34
2.1.6.2	Dewan Komisaris Independen .....	34
2.1.6.3	Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris .....	35
2.1.6.4	Ukuran Komite Audit.....	35
2.1.6.5	Komite Audit Independen .....	36
2.1.6.6	Kepemilikan Institusional .....	36
2.1.7	Penelitian Terdahulu .....	37
2.2	Kerangka Pemikiran .....	46
2.3	Hipotesis .....	49
2.3.1	Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial .....	49
2.3.2	Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial .....	50
2.3.3	Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial .....	51
2.3.4	Ukuran Komite Audit dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial .....	53
2.3.5	Komite Audit Independen dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial .....	54

2.3.6	Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial .....	55
BAB III METODE PENELITIAN .....		57
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	57
3.1.1	Variabel Dependen .....	57
3.1.1.1	Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .	57
3.1.2	Variabel Independen .....	59
3.1.2.1	Ukuran Dewan Komisaris .....	59
3.1.2.2	Dewan Komisaris Independen .....	59
3.1.2.3	Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris .....	60
3.1.2.4	Ukuran Komite Audit .....	60
3.1.2.5	Komite Audit Independen .....	61
3.1.2.6	Kepemilikan Institusional.....	61
3.2	Populasi dan Sampel.....	63
3.2.1	Populasi .....	63
3.2.2	Sampel .....	64
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	65
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	67
3.5	Metode Analisis .....	67
3.5.1	Statistik Deskriptif .....	67
3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	67
3.5.2.1	Uji Multikolonieritas .....	68
3.5.2.2	Uji Heteroskedastisitas .....	68
3.5.2.3	Uji Normalitas .....	69

3.5.3 Analisis Regresi Berganda .....	70
3.5.4 Uji Hipotesis .....	71
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	71
3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	71
3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	74
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	74
4.2 Analisis Data .....	75
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	75
4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	79
4.2.2.1 Uji Multikolonieritas .....	80
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas .....	81
4.2.2.3 Uji Normalitas .....	83
4.2.3 Pengujian <i>Goodness of Fit</i> Model Regresi .....	85
4.2.3.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	85
4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	87
4.2.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	88
4.2.4 Uji Hipotesis .....	89
4.3 Interpretasi Hasil .....	91
4.3.1 Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial .....	93
4.3.2 Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial .....	94
4.3.3 Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial .....	96

4.3.4	Ukuran Komite Audit dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial .....	98
4.3.5	Komite Audit Independen dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial .....	99
4.3.6	Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial .....	100
BAB V PENUTUP .....		103
5.1	Simpulan .....	103
5.2	Keterbatasan .....	104
5.3	Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....		107
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....		112

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	43
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel .....	62
Tabel 4.1 Jumlah Sampel Penelitian .....	75
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif .....	76
Tabel 4.3 <i>Coefficient Correlations</i> .....	80
Tabel 4.4 <i>Collinearity Statistics</i> .....	81
Tabel 4.5 <i>One Sample Kolmogorov-Smirnov</i> Uji Normalitas .....	85
Tabel 4.6 Koefisien Determinasi Uji <i>Goodness of Fit</i> .....	86
Tabel 4.7 Uji Statistik F .....	87
Tabel 4.8 Uji Statistik t .....	88

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	46
Gambar 4.1 Grafik Plot Uji Heteroskedastisitas .....	82
Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas .....	83
Gambar 4.3.. <i>Normal Probability Plot</i> Uji Normalitas .....	84

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Indikator <i>Global Reporting Initiatives</i> (GRI) .....	113
Lampiran B Daftar Sampel Perusahaan <i>High-Profile Industry</i> .....	114
Lampiran C Variabel Independen dan Dependen .....	120
Lampiran D <i>Output</i> SPSS Statistik Deskriptif .....	123
Lampiran E Hasil Pengujian Regresi Variabel Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Komite Audit Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	124

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Praktik tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Manfaat yang akan diperoleh perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu meningkatkan citra positif perusahaan, akses modal, mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*) (Daniri, 2009). Pernyataan Daniri (2009) mengenai manfaat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Solomon (2007) pada perusahaan di Amerika Serikat yang melakukan praktik tanggung jawab sosial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Solomon (2007) menunjukkan bahwa apabila suatu perusahaan melakukan praktik tanggung jawab sosial perusahaan, maka kinerja finansial perusahaan tersebut meningkat, akses modal, dan meningkatkan citra positif perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat 1 dan 2, direksi wajib mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan. Praktik pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan berinteraksi dengan masyarakat dan aktivitas perusahaan memiliki dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Namun demikian, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia masih rendah (Sulastini, 2007; Nurkhin, 2009). Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan mengenai standar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat dijadikan acuan bagi dewan direksi perusahaan dalam menyiapkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, motivasi yang mendorong dewan direksi secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan adalah hanya untuk melegitimasi tindakan perusahaan dan mematuhi persyaratan yang terdapat dalam Undang–Undang (Deegan, 2002).

Penerapan konsep *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal (Agoes dan Ardana, 2009). Penerapan konsep *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Daniri, 2009). Oleh karena itu, dewan direksi

perusahaan harus melaporkan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan kepada pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas perusahaan (Said, *et al.*, 2009). Dewan komisaris juga harus melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada dewan direksi (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan keanekaragaman hasil. Seperti penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Sembiring (2003) dan Sulastini (2007). Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Said, *et al.* (2009) menemukan hubungan yang tidak signifikan dari kedua variabel tersebut. Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Sembiring (2003), keanekaragaman hasil tersebut sebagian disebabkan karena model yang dikembangkan merupakan model yang sangat sederhana dan pengukuran yang digunakan tidak konsisten.

Hubungan antara komisaris independen dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga terjadi ketidakkonsistenan hasil. Handayani, *et al.* (2009) dan Said, *et al.* (2009) tidak menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Disisi lain, beberapa penelitian yang dilakukan oleh Huafang dan Jianguo (2007); Nurkhin (2009); dan Khan (2010) menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan.

Hubungan antara proporsi wanita dalam dewan komisaris dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga terjadi ketidakkonsistenan hasil. Wang dan Coffey (1992), Williams (2003), dan Huse, *et al.* (2009) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Disisi lain, beberapa penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010) menunjukkan tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan.

Hubungan antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal yang sulit dipahami misalnya Novita dan Djakman (2008); Handayani, *et al.* (2009) dan Nurkhin (2009) menunjukkan tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Disisi lain, Murwaningsari (2009) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara kedua variabel.

Secara lebih terperinci, penelitian yang dilakukan oleh Huafang dan Jianguo (2007) menguji struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela perusahaan pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Shanghai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan *blockholder* yang tinggi, kepemilikan saham luar negeri, dan komposisi dewan komisaris mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Selain itu, kepemilikan manajerial, *state ownership*, dan *legal-person ownership* mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan. Sebaliknya, dualitas CEO mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Said, *et al.* (2009) meneliti tentang hubungan antara ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dualitas CEO, komite audit independen, sepuluh pemegang saham terbesar, kepemilikan manajerial, kepemilikan luar negeri, dan kepemilikan pemerintah dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan publik Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dualitas CEO, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan luar negeri mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Komite audit independen dan kepemilikan pemerintah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009) menguji kepemilikan institusional, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini yaitu komisaris independen dan profitabilitas mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan.

Khan (2010) meneliti tentang pengaruh komisaris non-*executive*, adanya anggota dewan komisaris yang berkebangsaan asing, dan proporsi wanita dalam dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank komersial yang tercatat pada Bursa Efek Bangladesh. Khan (2010) menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara komisaris independen, dan adanya

anggota dewan komisaris yang berkebangsaan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan proporsi wanita dalam dewan komisaris mempunyai pengaruh yang tidak signifikan.

Dari berbagai karakteristik *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian terdahulu berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, penelitian ini akan menggunakan tujuh karakteristik *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran komite audit, komite audit independen, dan kepemilikan institusional. Pertimbangan dalam memilih tujuh karakteristik tersebut selain karena telah digunakan dalam berbagai penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- 1) Ukuran dewan komisaris diuji kembali karena Sembiring (2003) dan Sulastini (2007) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, semakin besar ukuran dewan komisaris maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO (manajemen puncak) dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya.

- 2) Komisaris independen diuji kembali karena Forker (1992) dalam Said, *et al.* (2009) menemukan bahwa persentase komisaris independen yang besar dalam dewan komisaris dapat meningkatkan pemantauan kualitas pengungkapan *financial* dan sosial, dan mengurangi manfaat informasi pemotongan pajak.
- 3) Proporsi wanita dalam dewan komisaris diuji kembali karena Carter, *et al.* (2003) berpendapat mendukung adanya keragaman dewan komisaris yaitu keragaman dewan komisaris dapat meningkatkan independensi dewan komisaris dengan alasan bahwa adanya perbedaan gender, etnis, atau latar belakang budaya dapat mengajukan pertanyaan yang tidak akan muncul dari dewan komisaris dengan latar belakang yang lebih tradisional. Keragaman dewan komisaris yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini yaitu proporsi wanita dalam dewan komisaris. Selain itu, variabel ini belum digunakan sebagai penduga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.
- 4) Ukuran komite audit diuji karena variabel ini belum digunakan sebagai penduga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Sembiring (2003) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran komite audit dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif. Hal ini mengakibatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas.

- 5) Komite audit independen diuji kembali karena keberadaan komite audit dengan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan pengendalian internal yang akan mengakibatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih tinggi (Forker, 1992 dalam Said, *et al.*, 2009).
- 6) Kepemilikan institusional diuji kembali karena perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (Arif, 2006). Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, aktivitas *monitoring* yang dilakukan oleh investor institusi dapat memaksa manajemen untuk mengungkapkan informasi sosialnya (Nurkhin, 2009). Hal ini dikarenakan investor institusi memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan (Permanasari, 2010).

Penelitian ini menggunakan perusahaan *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sebagai populasi penelitian. Penentuan jenis industri *high profile* pada penelitian ini didasarkan atas klasifikasi dikotomis menurut Patten (1991); Roberts (1992); dan Hackston dan Milne (1996). Patten (1991) mengidentifikasi perusahaan minyak, kimia dan kertas sebagai *high profile*. Selain itu, Roberts (1992) menggolongkan perusahaan *automobile*, penerbangan, dan industri minyak sebagai *high profile*. Hackston dan Milne (1996) menambahkan *agriculture*, minuman keras dan tembakau, dan media dan komunikasi sebagai *high profile*. Jadi, perusahaan yang termasuk dalam kategori *high profile* dimana perusahaan tersebut digunakan sebagai populasi dalam

penelitian ini yaitu perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan pertambangan, kimia, perhutanan dan agribisnis, kertas, otomotif, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, kesehatan, pariwisata, energi (listrik), *engineering*, pariwisata dan transportasi (Hackston dan Mine, 1996; Sembiring, 2003). Pertimbangan memilih perusahaan *high profile* sebagai populasi penelitian ini karena menurut Robert (1992), perusahaan *high profile* merupakan perusahaan yang lebih sensitif terhadap lingkungan, memiliki risiko politik yang lebih tinggi, atau tingkat persaingan yang ketat.

Secara umum, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya terutama dalam aspek–aspek berikut ini:

- 1) Penelitian ini menggunakan *Global Reporting Initiative (GRI) 2002 Guidelines* sebagai dasar item pengungkapan tanggung jawab sosial karena GRI (*Global Reporting Initiatives*) telah diterima secara global sebagai suatu standar untuk mengungkapkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dimana GRI (*Global Reporting Initiatives*) membantu perusahaan untuk memutuskan apa yang akan diungkapkan dan bagaimana mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial perusahaan (Sutantoputra, 2009).
- 2) Penelitian ini mengembangkan keterbatasan–keterbatasan penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran komite audit, komite audit independen, dan kepemilikan institusional sebagai penduga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3) Penelitian ini menggunakan perusahaan *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sebagai populasi penelitian

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul **“Hubungan antara Karakteristik *Corporate Governance* dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan *High Profile* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, terlihat adanya berbagai masalah seperti penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia masih rendah (Sulastini, 2007; Nurkhin, 2009). Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan mengenai standar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat dijadikan acuan bagi dewan direksi perusahaan dalam menyiapkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, penerapan konsep *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal (Agoes dan Ardana, 2009). Penerapan konsep *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Daniri, 2009). Permasalahan lainnya adalah adanya keanekaragaman hasil dan keterbatasan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dikembangkan dengan menguji kembali ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi dewan komisaris wanita, ukuran komite audit, komite audit independen, dan kepemilikan

institusional terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Untuk itu, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Apakah ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran komite audit, komite audit independen, dan kepemilikan institusional berhubungan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang disajikan oleh perusahaan *high profile* pada *annual report* perusahaan tersebut?”

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk membuktikan adanya hubungan antara beberapa karakteristik *corporate governance* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya hubungan antara ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran komite audit, komite audit independen, dan kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang disajikan oleh perusahaan *high profile* dalam *annual report* perusahaan tersebut.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gagasan dan ide untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2) Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada penyajian laporan keuangan.

3) Bagi Ikatan Akuntan Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan standar akuntansi sosial dan lingkungan.

4) Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam penyusunan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, khususnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang penelitian ini serta perumusan masalah penelitian yang penyusunannya disesuaikan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi teori-teori serta penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, bab ini juga dijelaskan susunan pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis penelitian. Pada bagian ini, diuraikan mengenai hubungan antara variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil *output* SPSS.

### **BAB V: PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan penelitian serta implikasi keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan pula saran bagi penelitian mendatang.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1. Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)**

Penelitian ini menggunakan teori *stakeholder* dalam mengembangkan hipotesis-hipotesis yang akan diuji. Pertimbangan memilih teori *stakeholder* karena teori *stakeholder* mengenai kekuatan hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder*-nya (Amran, *et al.*, 2009). Lebih jauh lagi, teori ini telah digunakan secara luas dalam studi-studi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Hackston dan Milne, 1996; Sembiring, 2003; Reverte, 2009).

Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Gray, *et al.* (1995) mengatakan bahwa:

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya.

Definisi *stakeholder* telah berubah secara substansial selama empat dekade terakhir. Pada awalnya, pemegang saham dipandang sebagai satu-satunya *stakeholder* perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Pandangan ini didasarkan pada argumen yang disampaikan oleh Friedman (1962) dalam Ghozali dan Chariri (2007) yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Namun demikian, Freeman (1983) dalam (Ghozali dan Chariri, 2007) tidak setuju dengan pandangan ini dan memperluas definisi *stakeholder* dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang dianggap tidak menguntungkan (*adversarial group*). Misalnya, pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator (Roberts, 1992).

*Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang mereka miliki atas sumber tersebut. *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan, 2003). Oleh karena itu, “ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*” (Ullman, 1985 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Lebih lanjut, Ullman (1985) dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa

organisasi akan memilih *stakeholder* yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya.

Atas dasar argumen di atas, teori *stakeholder* secara eksplisit mempertimbangkan dampak harapan dari kelompok *stakeholder* yang berbeda dalam masyarakat atas kebijakan pengungkapan informasi mengenai aktivitas perusahaan. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas perusahaan merupakan suatu alat manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok *stakeholder* yang kuat (karyawan perusahaan, pemegang saham, investor, konsumen, regulator, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sebagainya). Oleh karena itu, manajer menggunakan informasi ini untuk mengelola *stakeholder* yang kuat agar mendapatkan dukungan dari *stakeholder* dimana dukungan ini berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Gray, *et al.*, 1996 dalam Reverte, 2009).

Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk *manage stakeholder*-nya tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan (Ullman, 1985 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Perusahaan mungkin mengadopsi strategis yang aktif atau pasif. Perusahaan yang mengadopsi strategis aktif akan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya dengan *stakeholder* yang dipandang berpengaruh/penting (Ullman, 1985 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa *active posture* tidak hanya mengidentifikasi *stakeholder*, tetapi juga menentukan *stakeholder* mana yang memiliki kemampuan terbesar dalam mempengaruhi alokasi sumber ekonomi ke perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan *passive*

*posture* cenderung tidak terus-menerus memonitor aktivitas *stakeholder* dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik perhatian *stakeholder*. Kurangnya perhatian terhadap *stakeholder* (dalam pendekatan *passive posture*) akan mengakibatkan rendahnya tingkat pengungkapan informasi sosial dan rendahnya kinerja sosial perusahaan (Ullman, 1985 dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

### **2.1.2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)**

Beberapa studi tentang praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah menggunakan teori legitimasi sebagai basis menjelaskan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Hackston dan Milne, 1996; Sembiring, 2003; Husillos, *et al.*, 2009; Makela, 2009). Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan:

Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Gray, *et al.* (1995) berpendapat bahwa teori legitimasi dan teori *stakeholder* merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Hal ini dikarenakan pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi

lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. Berbeda dengan teori stakeholder, teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghazali dan Chariri (2007) memberikan alasan yang logis tentang legitimasi organisasi dan mengatakan sebagai berikut:

Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Landasan teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1974) dalam Ghazali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial sebagai berikut:

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada:

1. Hasil akhir (*output*) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas.
2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok sesuai dengan *power* yang dimiliki.

Di dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber *power* institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat permanen. Oleh karena itu, suatu institusi harus lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memang memerlukan jasa perusahaan dan kelompok tertentu yang

memperoleh manfaat dari penghargaan (*reward*) yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007).

Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa legitimasi tidak dapat didefinisikan hanya dengan mengatakan “apa yang legal atau ilegal”. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit dan eksplisit (Deegan, 2003). Menurut Deegan (2003), bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal (*uncodified community expectation*). Ada tiga alasan yang menyebabkan terjadinya korelasi yang tidak sempurna antara hukum dan norma/nilai sosial. *Pertama*, meskipun hukum sering dianggap sebagai refleksi dari norma dan nilai sosial, sistem hukum formal mungkin terlalu lambat dalam mengadaptasi perubahan norma dan nilai sosial di masyarakat. *Kedua*, sistem legal didasarkan pada konsistensi sedangkan norma mungkin kontradiktif (*contradictory*). *Ketiga*, masyarakat mungkin mentolerir perilaku tertentu tapi tidak menginginkan perilaku tersebut tercantum dalam aturan hukum (Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (O’Donovan, 2002). Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan

berada pada posisi terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sering dinamakan “*legitimacy gap*” dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya (Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Ghazali dan Chariri, 2007). *Legitimacy gap* dapat terjadi karena tiga alasan (Wartiel dan Mahon, 1994 dalam Ghazali dan Chariri, 2007):

- a. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah
- b. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah
- c. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Namun demikian, harus diingat bahwa keberadaan dan besarnya *legitimacy gap* bukanlah hal yang mudah untuk ditentukan. Yang penting adalah bagaimana perusahaan berusaha memonitor nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai sosial masyarakat dan mengidentifikasi kemungkinan munculnya gap tersebut (Ghazali dan Chariri, 2007). O’Donovan (2002) menyarankan bahwa ketika terdapat perbedaan antara kedua nilai tersebut, perusahaan perlu mengevaluasi nilai sosialnya dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Perusahaan juga dapat mengubah nilai-nilai sosial yang ada atau persepsi terhadap perusahaan sebagai taktik legitimasi. Jadi, untuk mengurangi *legitimacy gap*, perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang berada dalam kendalinya,

mengidentifikasi publik yang memiliki *power*, dan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan perusahaan kepada publik; sehingga mampu memberikan *legitimacy* kepada perusahaan (Neu, *et al.*, 1998 dalam Ghazali dan Chariri, 2007; Reverte, 2009).

### **2.1.3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya (Jauhari, 2010). Kerangka tanggung jawab sosial ini dirancang untuk memberikan nilai yang berkelanjutan bagi masyarakat pada umumnya (Said, *et al.*, 2009).

Elkington (1997) dalam Agoes dan Ardana (2009) mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup tiga dimensi, yang lebih populer dengan singkatan 3P, yaitu: mencapai keuntungan (*profit*) bagi perusahaan, memberdayakan masyarakat (*people*), dan memelihara kelestarian alam/bumi (*planet*).

Dari sudut pandang strategis, suatu perusahaan bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat dimana bisnis menjadi bagiannya. Ketika bisnis mulai mengabaikan tanggung jawabnya, masyarakat cenderung menanggapi melalui pemerintah untuk membatasi otonomi bisnis (Jauhari, 2010).

Menurut Jauhari (2010), beberapa alasan sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya, yakni:

- a. Moralitas: Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan terutama terkait dengan nilai-nilai moral dan keagamaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Hal tersebut bersifat tanpa mengharapkan balas jasa.
- b. Pemurnian Kepentingan Sendiri: Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Perusahaan berharap akan dihargai karena tindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Teori Investasi: Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap *stakeholder* karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan.
- d. Mempertahankan otonomi: Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap *stakeholder* untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada di dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajemen.

Menurut Jauhari (2010), ada beberapa manfaat tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:

1. Manfaat bagi Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan tentunya akan menimbulkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi *win-win solution*.

### 3. Manfaat bagi Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah merasa memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial.

Lawrence, *et al.* (2005) dalam Agoes dan Ardana (2009) melukiskan tingkat kesadaran para pelaku bisnis dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam bentuk tingkat keterlibatan bisnis dengan para pemangku kepentingan dalam beberapa tingkatan hubungan, yaitu *inactive*, *reactive*, *proactive*, dan *interactive*. Perusahaan yang *inactive* sama sekali mengabaikan apa yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Perusahaan yang *reactive* hanya bereaksi bila ada ancaman atau tekanan yang diperkirakan akan mengganggu perusahaan dari pihak pemangku kepentingan tertentu. Perusahaan yang *proactive* akan selalu mengantisipasi apa saja yang menjadi kepedulian para pemangku kepentingan, sedangkan perusahaan yang *interactive* selalu membuka diri dan mengajak para pemangku kepentingan untuk berdialog setiap saat atas dasar saling menghormati, saling memercayai, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan tingkat/lingkup keterlibatan ini, Lawrence, *et al.* (2005) dalam Agoes dan Ardana (2009) membedakan dua prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu: prinsip amal (*charity principles*) dan prinsip pelayanan (*stewardship principles*). Definisi prinsip amal (*charity principles*) yaitu bisnis seharusnya memberikan bantuan sukarela kepada orang atau kelompok yang memerlukan; misalnya mendirikan yayasan amal, berinisiatif untuk

menanggulangi masalah sosial, bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang memerlukan. Tipe aktivitas prinsip amal (*charity principles*) yaitu filantropi korporasi dan tindakan sukarela untuk menunjang citra perusahaan. Sebaliknya, prinsip pelayanan (*stewardship principles*) yaitu sebagai agen publik, tindakan bisnis seharusnya mempertimbangkan semua kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan perusahaan; misalnya pribadi yang tercerahkan, memenuhi ketentuan hukum, menggunakan pendekatan *stakeholders* dalam perencanaan strategis perusahaan. Tipe aktivitas prinsip pelayanan (*stewardship principles*) yaitu mengakui adanya saling ketergantungan perusahaan dengan masyarakat dan menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua ragam kelompok di masyarakat.

#### **2.1.4. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sering disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting*, atau *corporate social responsibility* (Hackston dan Milne, 1996; Sembiring, 2003). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai ketentuan informasi finansial dan nonfinansial yang berhubungan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan sosial dan fisik organisasi tersebut, seperti dinyatakan dalam laporan tahunan perusahaan atau salinan laporan sosial (Guthrie dan Mathews, 1985 dalam Hackston dan Milne, 1996). Hal senada juga diungkapkan oleh Sembiring (2003) dimana pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan

lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi dalam hal ini perusahaan, di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham (Gray, *et al.*, 1995). Menurut Hackston dan Milne (1996), pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mencakup rincian informasi atas lingkungan fisik, energi, sumber daya manusia, produk yang dihasilkan, dan keterlibatan masyarakat.

Menurut O'Donovan (2002), beberapa manfaat yang diperoleh dari praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:

- a. Menyelaraskan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial,
- b. Menghindari tekanan dari kelompok tertentu,
- c. Meningkatkan *image* dan reputasi perusahaan, dan
- d. Menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ada berbagai motivasi yang mendorong manajer secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan. Menurut Deegan (2002), alasan tersebut antara lain:

- a. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang.
- b. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (*economic rationality*). Atas dasar alasan ini, praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan “hal yang benar” dan alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama.
- c. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan. Artinya, manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan dan manajer tidak peduli dengan cost yang diperlukan untuk menyajikan informasi tersebut.
- d. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman. Lembaga pemberi pinjaman, sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko mereka, cenderung menghendaki peminjam untuk secara periodik memberikan berbagai item informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial dan lingkungannya.
- e. Untuk memenuhi harapan masyarakat, barangkali refleksi atas pandangan bahwa kepatuhan terhadap “ijin yang diberikan masyarakat untuk beroperasi” (atau “kontrak sosial”) tergantung pada penyediaan informasi berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan.
- f. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
- g. Untuk me-*manage* kelompok *stakeholder* tertentu yang *powerful*.
- h. Untuk menarik dana investasi. Di lingkungan internasional, *ethical investment funds* merupakan bagian dari pasar modal yang semakin meningkat peranannya.
- i. Untuk mematuhi persyaratan industri (*code of conduct*) tertentu.

j. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu.

Menurut Freedman (1962) dalam Siegel dan Marconi (1989), ada tiga tipe dari pengungkapan kinerja sosial perusahaan, yaitu:

1. Pemeriksaan Sosial (*Social Audit*), pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari program perusahaan yang berorientasi sosial. Pemeriksaan sosial dilakukan dengan membuat suatu daftar aktivitas perusahaan yang memiliki konsekuensi sosial, kemudian auditor mengestimasi dan mengukur dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.
2. Laporan Sosial (*Social Report*), berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah diajukan oleh para akademisi dan praktisi. Menurut Henny dan Murtanto (2001), pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab sosialnya antara lain:
  - a) *Inventory Approach*, dimana perusahaan mengkompilasi dan mengungkapkan suatu daftar yang komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosialnya. Daftar ini harus memuat semua aktivitas sosial perusahaan baik yang bersifat positif maupun negatif.
  - b) *Cost Approach*, perusahaan membuat daftar aktivitas sosialnya dan mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas tersebut.
  - c) *Program Management Approach*, perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya, tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut, serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

d) *Cost-Benefit Approach*, perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak sosial serta biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan dalam penggunaan pendekatan ini adalah untuk mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan perusahaan tersebut terhadap masyarakat.

3. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Laporan Tahunan (*Social Disclosure in Annual Report*), pengungkapan aktivitas sosial perusahaan dalam hal ini dilakukan melalui media laporan tahunan.

Di Indonesia, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) karena praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat 1 dan 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat 1 dan 2, direksi wajib mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia berpedoman kepada standar yang telah dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 1 (Revisi 1998), Paragraf 9, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

Berdasarkan PSAK ini, perusahaan di Indonesia dapat melaporkan kegiatan sosialnya untuk dikomunikasikan kepada pihak luar dalam bentuk laporan tambahan.

### **2.1.5. *Corporate Governance***

Istilah “*corporate governance*” pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee*, Inggris, di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report* (Agoes dan Ardana, 2009). Menurut *Cadbury Committee of United Kingdom* (1992) dalam Agoes dan Ardana (2009), *Corporate Governance* yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Agoes dan Ardana (2009) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Menurut Eitemann, *et al.* (2010), prinsip-prinsip *good corporate governance* mencakup lima bidang utama, yaitu:

1. Hak pemegang saham: kerangka *corporate governance* harus melindungi hak-hak pemegang saham.

2. Perlakuan yang adil bagi pemegang saham: kerangka *corporate governance* harus menjamin perlakuan yang sama dari semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.
3. Peran *stakeholder* dalam *corporate governance*: kerangka *corporate governance* harus mengakui hak-hak *stakeholder* sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan *stakeholder* dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan finansial perusahaan.
4. Keterbukaan dan transparansi: kerangka *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan tepat waktu dan akurat dibuat tentang semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan *corporate governance*.
5. Tanggung jawab dewan: kerangka *corporate governance* harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Tjager, *et al.* (2003) dalam Agoes dan Ardana (2009) mengatakan bahwa ada lima alasan penerapan *good corporate governance* bermanfaat, yaitu:

1. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey&Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan

terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan *good corporate governance*.

2. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya *corporate governance*.
3. Internasionalisasi pasar, termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal, menuntut perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance*.
4. Walaupun *good corporate governance* bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah.
5. Secara teoritis, praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Surya dan Yustiavandana (2007) dalam Agoes dan Ardana (2009) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan *good corporate governance* adalah:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Di Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara eksplisit tentang *good corporate governance*. Meskipun demikian, Undang-Undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dari organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Agoes dan Ardana, 2009).

RUPS merupakan organ tertinggi dan memegang wewenang tertinggi dalam perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi tindakan Dewan Direksi serta memberikan nasehat dan arahan kepada Dewan Direksi dalam menjalankan operasi perusahaan. Dewan Direksi bertugas untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan arahan dan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS, Dewan Komisaris, serta Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku dalam koridor hukum. Uraian tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab masing-masing organ ini selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Akan tetapi, dalam praktiknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya *good corporate governance* (Agoes dan Ardana, 2009). Surya dan Yustiavandana (2007) dalam Agoes dan Ardana (2009) menyebutkan paling tidak diperlukan empat organ tambahan untuk melengkapi penerapan *good corporate governance*, yaitu Komisaris Independen, Direktur Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan.

Sehubungan dengan sistem hukum yang berkaitan dengan organ Direksi dan Komisaris ini, dapat dijumpai adanya dua sistem pengelola puncak (*top management*) suatu perseroan, yaitu model Anglo-Saxon dan model Kontinental. Model Anglo-Saxon (disebut juga *single-board system*) diikuti oleh Amerika Serikat dan Inggris. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya pemisahan antara Direksi (selaku pelaksana) dengan Dewan Komisaris (selaku pengawas). Kedua fungsi ini disatukan dan disebut sebagai *Board of Directors*. Dalam sistem Kontinental, yang dianut oleh negara-negara Eropa selain Inggris yang juga dianut oleh Indonesia, menggunakan model *two-board system*, dimana organ Dewan Direksi sebagai eksekutif Perseroan dipisah dengan organ Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas dan penasihat Direksi (Agoes dan Ardana, 2009).

#### **2.1.6. Karakteristik *Corporate Governance***

Beberapa literatur empirik menunjukkan adanya beberapa karakteristik *corporate governance* yang menjelaskan berbagai variasi dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan (Sembiring, 2003; Huafang dan Jianguo, 2007; Sulastini, 2007; Novita dan Djakman, 2008; Handajani, *et al.*, 2009; Murwaningsari, 2009; Nurkhin, 2009; Said, *et al.*, 2009; Khan, 2010). Karakteristik *corporate governance* yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran komite audit, komite audit independen, dan kepemilikan institusional. Penjelasan singkat mengenai karakteristik *corporate governance* yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

#### **2.1.6.1. Ukuran Dewan Komisaris**

Ukuran dewan komisaris menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dewan komisaris dijelaskan secara lebih terperinci pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 1 dan 2 yaitu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Selain itu, perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 3, 4, dan 5).

#### **2.1.6.2. Komisaris Independen**

Komisaris independen menunjukkan proporsi komisaris independen yang terdapat dalam susunan dewan komisaris. Menurut Said, *et al.* (2009), komisaris

independen memiliki peranan penting dalam meningkatkan *image* perusahaan dan bertindak sebagai peran pemantauan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan dengan benar dikelola oleh manajemen.

#### **2.1.6.3. Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris**

Branco dan Rodrigues (2008) menyatakan bahwa tema keragaman dewan komisaris sesuai dengan struktur teori *stakeholder*. Carter, *et al.* (2003) berpendapat mendukung adanya keragaman dewan komisaris yaitu keragaman dewan komisaris dapat meningkatkan independensi dewan komisaris dengan alasan bahwa adanya perbedaan gender, etnis, atau latar belakang budaya dapat mengajukan pertanyaan yang tidak akan muncul dari dewan komisaris dengan latar belakang yang lebih tradisional. Keragaman dewan komisaris yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini yaitu proporsi wanita dalam dewan komisaris.

#### **2.1.6.4. Ukuran Komite Audit**

Ukuran komite audit menunjukkan jumlah anggota komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik (Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Tahun 2004).

#### **2.1.6.5. Komite Audit Independen**

Komite audit independen menunjukkan proporsi komisaris independen dalam susunan komite audit. Menurut Jemison dan Oakley (1983) dalam Abdullah (2007), komisaris independen merupakan salah satu syarat agar komite audit efektif. Hal ini dikarenakan keberadaan komite audit dengan proporsi komisaris independen yang lebih besar dapat mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan pengendalian internal yang akan menyebabkan kualitas pengungkapan yang lebih baik (Forker, 1992 dalam Said, *et al.*, 2009).

#### **2.1.6.6. Kepemilikan Institusional**

Salah satu struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Novita dan Djakman, 2008). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) (Tarjo, 2008). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (Arif, 2006). Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, aktivitas *monitoring* yang dilakukan oleh investor institusi dapat memaksa manajemen untuk mengungkapkan informasi sosialnya (Nurkhin, 2009). Hal ini dikarenakan investor institusi memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan (Permanasari, 2010).

### **2.1.7. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan umum dari beberapa literatur yang relevan mengindikasikan bahwa telah terdapat penelitian-penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara komprehensif (Hackston dan Milne, 1996; Sembiring, 2003; Huafang dan Jianguo, 2007; Sulastini, 2007; Novita dan Djakman, 2008; Handajani, *et al.*, 2009; Murwaningsari, 2009; Nurkhin, 2009; Said, *et al.*, 2009; Khan, 2010).

Hackston dan Milne (1996) menyelidiki tentang praktik pengungkapan sosial pada 47 perusahaan di New Zealand. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan suatu deskripsi terbaru praktik pengungkapan sosial perusahaan di New Zealand dengan mengacu pada pendokumentasian praktik pengungkapan sosial perusahaan di luar negeri dan menguji beberapa faktor potensial yang mempengaruhi pengungkapan sosial pada perusahaan New Zealand. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996), kategori-kategori instrumen pengungkapan sosial perusahaan disusun berdasarkan pada penelitian terdahulu (Ernst dan Ernst, 1978; Guthrie dan Parker, 1990; dan Gray, *et al.*, 1995) dan menambahkan dimensi dari tema pengungkapan (lingkungan, energi, produk/konsumen, komunitas, sumber daya manusia/pegawai, lainnya/hal yang umum); fakta (perhitungan moneter, perhitungan nonmoneter, pernyataan); tipe berita (berita baik, berita buruk, dan berita netral); dan jumlah (jumlah kalimat). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, dan tipe industri memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sosial perusahaan, sedangkan profitabilitas tidak mempengaruhi secara signifikan.

Sembiring (2003) menyelidiki hubungan antara karakteristik perusahaan, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, *profile*, ukuran dewan komisaris, dan *leverage* dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada 78 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sembiring (2003) menggunakan penelitian terdahulu (penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996)) dan Peraturan Bapepam No.VIII.G.2 tentang laporan tahunan, untuk mengembangkan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Teknik analisis untuk menguji hipotesis yaitu menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 10.00. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *profile*, dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, profitabilitas dan *leverage* gagal untuk menunjukkan pengaruh signifikansinya.

Huafang dan Jianguo (2007) menguji pengaruh struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada 559 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek China. Huafang dan Jianguo (2007) menggunakan standar akuntansi, penelitian terdahulu, dan *Code of Corporate Governance for Listed Companies in China*; untuk mengembangkan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penggunaan model regresi OLS untuk menguji hubungan antara struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan tingkat pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan *blockholder* yang tinggi, kepemilikan saham luar negeri, dan komposisi dewan komisaris mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap

tingkat pengungkapan sukarela. Selain itu, kepemilikan manajerial, *state ownership*, dan *legal-person ownership* mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan. Sebaliknya, dualitas CEO mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Sulastini (2007) meneliti mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan sosial pada 146 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2003). Metode analisa data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS *for window release* 11.5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor-faktor *size* perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan *profile* perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur. Secara parsial, hanya profitabilitas yang memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Novita dan Djakman (2008) menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) pada 107 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Novita dan Djakman (2008) menggunakan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai *Corporate Social Disclosure Index* (CSDI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Handajani, *et al.* (2009) menguji pengaruh antara *earnings management* dan mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada 67 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Handajani, *et al.* (2009) menggunakan indikator *Global Reporting Initiative (GRI)* sebagai *Corporate Social Disclosure Index (CSDI)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *earnings management*, komite audit, *profile* perusahaan dan tipe industri mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan, sedangkan komposisi dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Murwaningsari (2009) mengidentifikasi pengaruh antara struktur *Corporate Governance* yang diprosikan sebagai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Corporate Financial Performance* pada 126 perusahaan publik yang terdapat di Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2009), *Corporate Social Responsibility* digunakan sebagai variabel *intervening*. Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996). Melalui pendekatan analisa jalur (*path analysis*) menunjukkan *Good Corporate Governance* yaitu kepemilikan manajerial dan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. *Good Corporate Governance* yang diamati melalui kepemilikan manajerial dan institusional, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengujian variabel kontrol, yaitu *CEO Tenure*

mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan jenis industri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk *Corporate Secretary* dan Komite Nominasi dan Remunerasi juga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Nurkhin (2009) menyelidiki pengaruh faktor *Corporate Governance* (yaitu kepemilikan institusional dan mekanisme struktur dewan komisaris) dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan ukuran dan tipe industri perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini dilakukan pada 89 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Analisis deskriptif dan statistik digunakan sebagai teknik analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan struktur dewan komisaris dan profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan.

Said, *et al.* (2009) menguji hubungan antara karakteristik *Corporate Governance* (yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dualitas CEO, komite audit, sepuluh pemegang saham terbesar, kepemilikan manajerial, kepemilikan luar negeri, dan kepemilikan pemerintah) dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada 150 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Malaysia. Said, *et al.* (2009) menggunakan penelitian terdahulu (penelitian yang dilakukan oleh Ernst dan Whinney (1978), Hackston dan Milne (1996), Haniffa dan Cooke (2005), Manasseh (2004), dan Shaw Warn (2004)) untuk mengembangkan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan. Analisis regresi hierarki digunakan untuk menguji hubungan antara indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan variabel independen (yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dualitas CEO, komite audit, sepuluh pemegang saham terbesar, kepemilikan manajerial, kepemilikan luar negeri, dan kepemilikan pemerintah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya dua variabel yang berhubungan positif dan signifikan dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu kepemilikan pemerintah dan komite audit, sedangkan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dualitas CEO, sepuluh pemegang saham terbesar, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan luar negeri tidak mempengaruhi secara signifikan.

Khan (2010) menyelidiki informasi pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada 60 bank komersial yang terdaftar di Bursa Efek Bangladesh dan menyelidiki pengaruh potensial elemen *corporate governance* pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Khan (2010) menggunakan penelitian terdahulu (penelitian yang dilakukan oleh Ernst dan Ernst (1976); Cowen, *et al.* (1987); Guthrie dan Parker (1989, 1990); Gray, *et al.* (1995)) yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis di Bangladesh, untuk mengembangkan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh elemen *corporate governance* pada pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada bank komersial yang terdapat di Bursa Efek Bangladesh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan dewan komisaris

independen dan adanya orang yang berkebangsaan asing dalam dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Tahun	Peneliti	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	1996	Hackston dan Milne	Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, Profitabilitas	1) Ukuran Perusahaan dan Tipe Industri memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sosial perusahaan. 2) Profitabilitas tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap luas pengungkapan sosial perusahaan.
2.	2003	Sembiring	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Profile</i> , Ukuran Dewan Komisaris, dan <i>Leverage</i>	1) Ukuran Perusahaan, <i>Profile</i> , dan Ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 2) Profitabilitas dan <i>Leverage</i> gagal untuk menunjukkan pengaruh signifikansinya.
3.	2007	Huafang dan Jianguo	<i>Blockholder ownership</i> , Kepemilikan Manajerial, <i>State Ownership</i> , <i>Legal-Person Ownership</i> , Kepemilikan saham oleh pihak asing, Dewan Komisaris Independen, Dualitas CEO	1) <i>Blockholder Ownership</i> , dan Kepemilikan saham oleh pihak asing yang tinggi dan adanya Dewan Komisaris Independen akan meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela. 2) Kepemilikan Manajerial, <i>State Ownership</i> , dan <i>Legal-Person Ownership</i> tidak mempengaruhi pengungkapan secara signifikan.

No.	Tahun	Peneliti	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
4.	2007	Sulastini	Profitabilitas, <i>Size</i> Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris	1) Secara simultan, terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor <i>size</i> perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan <i>profile</i> perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur. 2) Secara parsial, hanya profitabilitas yang memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
5.	2008	Novita dan Djakman	Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Instiusional	Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Instiusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
6.	2009	Handajani, <i>et al.</i>	Komposisi Dewan Komisaris, Kepemilikan Instiusional, Komite Audit, <i>Size</i> Perusahaan	1) Komite Audit dan <i>Size</i> Perusahaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan. 2) Komposisi Dewan Komisaris dan Kepemilikan Instiusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan.
7.	2009	Murwaning sari	Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Instiusional	Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Instiusional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

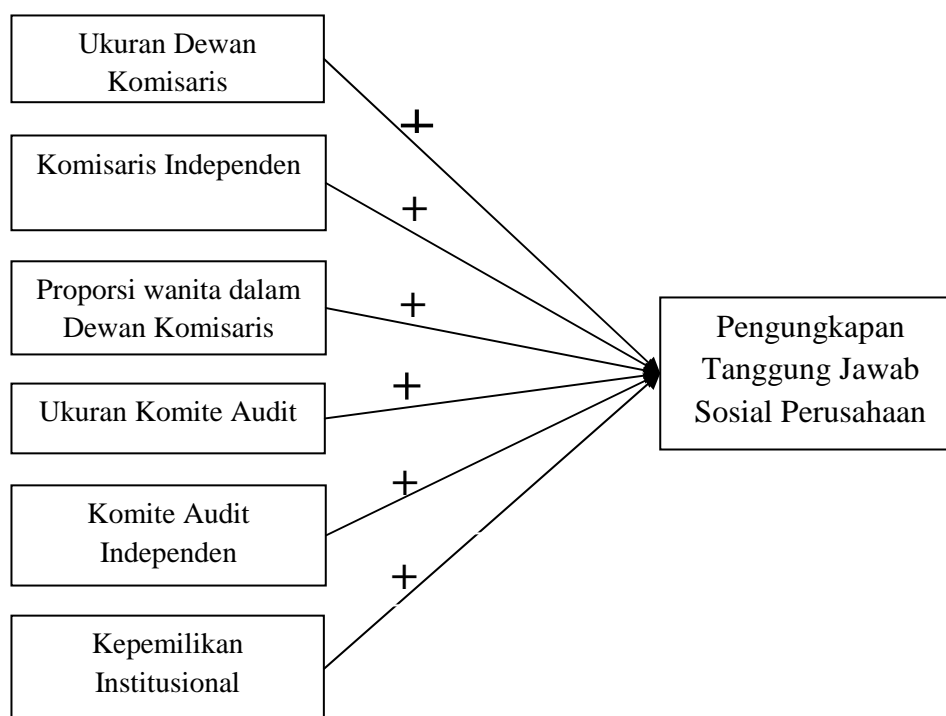
No.	Tahun	Peneliti	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
8.	2009	Nurkhin	Kepemilikan Institusional, Komposisi Dewan Komisaris, Profitabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.</li> <li>2) Komposisi Dewan Komisaris dan Profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.</li> </ol>
9.	2009	Said, <i>et al.</i>	Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Dualitas CEO, Sepuluh pemegang saham terbesar, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Luar Negeri, Kepemilikan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepemilikan Pemerintah dan Komite Audit mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.</li> <li>2) Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dualitas CEO, Sepuluh pemegang saham terbesar, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Luar Negeri tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.</li> </ol>
10.	2010	Khan	Perwakilan Wanita dalam Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Keberadaan Orang Asing dalam Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perwakilan Wanita dalam Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.</li> <li>2) Komisaris Independen dan Keberadaan Orang Asing dalam Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.</li> </ol>

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang terdapat di bagian 2.1.6 yaitu mengenai karakteristik *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka kerangka pemikiran dapat dinyatakan dalam gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Bagian pertama dalam kerangka pemikiran (Gambar 2.1) menggambarkan adanya hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang besar akan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan lebih luas. Hal

ini dikarenakan semakin besar ukuran dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO (manajemen puncak) dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya (Sembiring, 2003).

Pada bagian kedua dalam kerangka pemikiran (Gambar 2.1) menggambarkan adanya hubungan positif antara komisaris independen dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Persentase komisaris independen yang lebih besar dalam dewan komisaris akan mengakibatkan lebih banyak pengungkapan sukarela tentang informasi perusahaan. Hal ini dikarenakan persentase komisaris independen yang lebih besar dalam dewan komisaris akan meningkatkan pemantauan kualitas finansial dan sosial, dan mengurangi manfaat pemotongan pajak (Forker, 1992 dalam Said, *et al.*, 2009).

Bagian ketiga dalam kerangka pemikiran (Gambar 2.1) menggambarkan adanya hubungan positif antara proporsi wanita dalam dewan komisaris dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dengan persentase wanita dalam dewan komisaris yang besar akan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan lebih banyak. Adanya keragaman dewan komisaris, yang didefinisikan sebagai proporsi wanita dalam dewan komisaris, dapat meningkatkan independensi dewan komisaris. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan gender, etnis, atau latar belakang budaya dapat mengajukan pertanyaan yang tidak akan muncul dari dewan komisaris dengan latar belakang yang lebih tradisional.

Bagian keempat dalam kerangka pemikiran (Gambar 2.1) menggambarkan adanya hubungan positif antara ukuran komite audit dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dengan ukuran komite audit yang besar akan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan lebih besar. Semakin besar ukuran komite audit maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif. Hal ini mengakibatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas (Sembiring, 2003).

Bagian kelima dalam kerangka pemikiran (Gambar 2.1) menggambarkan adanya hubungan positif antara komite audit independen dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dengan komite audit independen yang besar akan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan lebih banyak. Keberadaan komite audit dengan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan pengendalian internal yang akan mengakibatkan kualitas pengungkapan yang lebih tinggi (Forker, 1992 dalam Said, *et al.*, 2009).

Bagian keenam dalam kerangka pemikiran menggambarkan adanya hubungan positif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (Arif, 2006). Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, aktivitas *monitoring* yang dilakukan oleh investor institusi dapat memaksa manajemen

untuk mengungkapkan informasi sosialnya (Nurkhin, 2009). Hal ini dikarenakan investor institusi memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan (Permanasari, 2010).

### **2.3. Hipotesis**

#### **2.3.1. Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Dewan komisaris merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam mekanisme *corporate governance*. Dewan komisaris berperan dalam mengawasi pelaksanaan bisnis perusahaan yang sedang dikelola oleh dewan direksi mereka dengan sebaik-baiknya (Said, *et al.*, 2009). Pada penelitian yang dilakukan oleh Said, *et al.* (2009) menemukan hubungan yang tidak signifikan dari kedua variabel tersebut. Sementara itu, penelitian sebelumnya (Sembiring, 2003; Sulastini, 2007) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sembiring (2003); dan Sulastini (2007) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO (manajemen puncak) dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H1*: Adanya hubungan yang positif antara ukuran dewan komisaris dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

### **2.3.2. Komisaris Independen dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Literatur empiris mengenai *corporate governance* menunjukkan bahwa tingkat independensi dewan komisaris berkaitan dengan komposisi, dan independensi akan menumbuhkan efektivitas dewan komisaris (Huafang dan Jianguo, 2007; Nurkhin, 2009; Khan, 2010). Webb (2004) dalam Said, *et al.* (2009) meneliti mengenai perbedaan antara struktur dewan komisaris pada perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan nonsosial. Webb (2004) dalam Said, *et al.* (2009) menemukan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab sosial memiliki lebih banyak komisaris yang *outsiders/independen* dibandingkan dengan perusahaan yang bertanggung jawab nonsosial. Komisaris independen memiliki semangat yang tinggi untuk menjaga kepentingan para pemegang saham dengan baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki peranan penting dalam meningkatkan *image* perusahaan dan bertindak sebagai suatu peran pemantauan untuk memastikan bahwa perusahaan telah dikelola dengan benar oleh dewan direksi. Konsekuensi dari ketidakterlibatan perusahaan dalam tanggung jawab sosial perusahaan akan mencerminkan citra buruk bagi perusahaan.

Komisaris independen dianggap sebagai alat untuk memantau perilaku dewan direksi (manajemen), sehingga mengakibatkan lebih banyak pengungkapan

sukarela tentang informasi perusahaan (Huafang dan Jianguo, 2007; Rosenstein dan Wyatt, 1990 dalam Said, *et al.*, 2009; Nurkhin, 2009; Khan, 2010). Selain itu, Forker (1992) dalam Said, *et al.* (2009) menemukan bahwa dewan komisaris independen dengan persentase lebih besar dalam dewan komisaris meningkatkan pemantauan kualitas pengungkapan finansial dan sosial, dan mengurangi manfaat informasi dari pemotongan pajak. Akan tetapi, Handayani, *et al.* (2009) dan Said, *et al.* (2009) tidak menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara dewan komisaris independen dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H2*: Adanya hubungan yang positif antara proporsi dewan komisaris independen dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

### **2.3.3. Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Literatur empiris mengenai *corporate governance* menunjukkan bahwa keragaman dewan komisaris telah berubah menjadi suatu unsur atas susunan *corporate governance* yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Khan, 2010). Branco dan Rodrigues (2008) menyatakan bahwa tema keanekaragaman dewan komisaris sesuai dengan struktur teori *stakeholder*. Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa keragaman dewan komisaris terkait dengan orientasi yang kuat terhadap pelaporan sosial perusahaan dan intensitas kinerja sosial yang lebih tinggi (Wang dan Coffey, 1992; Williams, 2003; Huse, *et al.*, 2009). Akan tetapi, Khan (2010) menemukan bahwa proporsi wanita dalam dewan komisaris

tidak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada bank komersial di Bangladesh.

Carter, *et al.* (2003) menunjukkan bukti empiris mengenai hubungan positif yang signifikan antara keanekaragaman dewan komisaris, yang didefinisikan sebagai persentase wanita, Afrika, Amerika, Asia dan Hispanik dalam dewan komisaris; dan nilai perusahaan. Carter, *et al.* (2003) berpendapat mendukung adanya keragaman dewan komisaris yaitu keragaman dewan komisaris dapat meningkatkan independensi dewan komisaris dengan alasan bahwa adanya perbedaan gender, etnis, atau latar belakang budaya dapat mengajukan pertanyaan yang tidak akan muncul dari dewan komisaris dengan latar belakang yang lebih tradisional.

Selain itu, Huse dan Solberg (2006) mengilustrasikan bahwa wanita dapat diikutsertakan dalam dewan komisaris melalui pembentukan aliansi, mempersiapkan dan melibatkan dirinya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh dewan komisaris, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang penting. Adams dan Ferreira (2004) dalam Khan (2010) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris wanita yang lebih tinggi cenderung membuat rapat dewan lebih memungkinkan dan pola kehadiran yang khusus pada pertemuan dewan komisaris, dimana membuat dewan komisaris yang berbeda lebih sukses dibandingkan dewan komisaris yang homogen. Adams dan Ferreira (2004) dalam Khan (2010) juga berpendapat bahwa sudah menjadi sifat wanita lebih menstabilkan dibandingkan laki-laki. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H3*: Adanya hubungan yang positif antara proporsi wanita dalam dewan komisaris dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

#### **2.3.4. Ukuran Komite Audit dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Penelitian sebelumnya (Pincus, *et al.*, 1989; Einchenseher dan Shields, 1985; Menon dan Williams, 1994 dalam Saleh, *et al.*, 2009) menemukan hubungan yang tidak signifikan antara ukuran komite audit dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, komite audit harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya agar efektivitas komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak dapat tercapai (Vinten dan Lee, 1993 dalam Saleh, *et al.*, 2009).

Sembiring (2003) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran komite audit dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif. Hal ini mengakibatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H4*: Adanya hubungan yang positif antara ukuran komite audit dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

### **2.3.5. Komite Audit Independen dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa komite audit memiliki peran yang efektif dalam meningkatkan standar tata kelola perusahaan (*corporate governance*) (Nasution dan Setiawan, 2007; Handajani, *et al.*, 2009; Said, *et al.*, 2009). Nasution dan Setiawan (2007) menyediakan dukungan untuk asosiasi antara kehadiran komite audit dan pelaporan keuangan yang lebih handal. Keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela (Handajani, *et al.*, 2009; Said, *et al.*, 2009).

Peran komite audit adalah menyediakan suatu arti untuk mengkaji proses perusahaan dalam menghasilkan data keuangan dan pengendalian internal perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan komite audit diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Said, *et al.*, 2009). Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Tahun 2004, dewan komisaris harus membentuk komite audit dengan setidaknya satu orang komisaris independen atau lebih. Keberadaan komite audit dengan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan pengendalian internal yang akan mengakibatkan kualitas pengungkapan yang lebih tinggi (Forker, 1992 dalam Said, *et al.*, 2009). Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H5*: Adanya hubungan yang positif antara proporsi komisaris independen yang duduk dalam komite audit dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

### **2.3.6. Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) (Tarjo, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Novita dan Djakman (2008); Handayani, *et al.* (2009); Nurkhin (2009) menemukan adanya hubungan yang tidak signifikan antara kepemilikan institusional dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, Arif (2006) menyatakan bahwa tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Hal senada juga dikemukakan oleh Barnae dan Rubin (2005) dalam Novita dan Djakman (2008); Murwaningsari (2009) bahwa *institutional shareholders*, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, aktivitas *monitoring* yang dilakukan oleh investor institusi dapat memaksa manajemen untuk mengungkapkan informasi sosialnya (Nurkhin, 2009). Hal ini dikarenakan investor institusi memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi dalam perusahaan (Permanasari, 2010).

Sebagai bentuk institusi memerlukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terjadi pada perbankan Eropa, dimana perbankan di Eropa

menerapkan kebijakan dalam pemberian pinjaman hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik (Novita dan Djakman, 2008). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

*H6*: Adanya hubungan yang positif antara kepemilikan institusional dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Variabel Dependen**

###### **3.1.1.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan data yang diungkapkan oleh perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosialnya meliputi ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk.

Penelitian ini menggunakan *content analysis* untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertimbangan menggunakan *content analysis* dalam penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada luas atau jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Amran, 2009). *Content analysis* merupakan suatu metode kodifikasi teks (atau isi) dari suatu tulisan atau kategori tergantung pada kriteria yang dipilih (Weber, 1988 dalam Said, *et al.*, 2009). Dalam format lain, metode ini telah secara luas diadopsi dalam penelitian terdahulu tentang pengungkapan tanggung jawab sosial seperti Hackston dan Milne (1996); Sembiring (2003); Sulastini (2007); Branco dan Rodrigues (2008); Novita dan Djakman (2008); Handajani, *et al.* (2009); Nurkhin (2009); Said, *et al.* (2009); dan Khan (2010).

*Checklist* dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam enam kategori yaitu ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Kategori pada *checklist* berdasarkan pada indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*). Keenam kategori tersebut terbagi dalam tujuh puluh sembilan item pengungkapan. Penggunaan GRI (*Global Reporting Initiatives*) sebagai dasar item pengungkapan tanggung jawab sosial karena GRI (*Global Reporting Initiatives*) telah diterima secara global sebagai suatu standar untuk mengungkapkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dimana GRI (*Global Reporting Initiatives*) membantu perusahaan untuk memutuskan apa yang akan diungkapkan dan bagaimana mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial perusahaan (Sutantoputra, 2009).

*Checklist* dilakukan untuk setiap item yang diungkapkan oleh perusahaan (Sembiring, 2003). *Checklist* menggunakan pendekatan dikotomi yaitu nilai 1 akan diberikan jika setiap item tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*). Akan tetapi, nilai 0 akan diberikan jika tidak terdapat item tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*) (Novita dan Djakman, 2008; Nurkhin, 2009). Total *checklist* dihitung untuk mendapatkan jumlah item yang diungkapkan perusahaan. Indeks pengungkapan masing-masing perusahaan kemudian dihitung dengan membagi jumlah item yang diungkapkan perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan sesuai dengan indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*) (yaitu sebanyak tujuh puluh sembilan

item). Perhitungan indeks pengungkapan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia (Sembiring, 2003), yang dapat dinotasikan dalam rumus sebagai berikut:

$$CSDI = \frac{V}{79} \quad (3.1)$$

Dimana: CSDI = Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

V = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan

### 3.1.2 Variabel Independen

#### 3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Skala yang digunakan untuk ukuran dewan komisaris adalah rasio. Indikator ukuran dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proporsi jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan terhadap jumlah minimal anggota dewan komisaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 5, Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris.

$$Ukuran\ Dewan\ Komisaris = \frac{Jumlah\ Anggota\ Dewan\ Komisaris}{2} \quad (3.2)$$

#### 3.1.2.2 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris suatu perusahaan. Skala yang digunakan untuk komisaris

independen adalah rasio. Indikator komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini konsisten dengan Handajani, *et al.* (2009), Nurkhin (2009) dan Said, *et al.* (2009) yaitu proporsi komisaris independen terhadap total dewan komisaris.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \quad (3.3)$$

### 3.1.2.3 Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris

Proporsi wanita dalam dewan komisaris merupakan jumlah dewan komisaris wanita dalam dewan komisaris suatu perusahaan. Skala yang digunakan untuk proporsi wanita dalam dewan komisaris adalah rasio. Indikator proporsi wanita dalam dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini konsisten dengan Khan (2010) yaitu proporsi dewan komisaris wanita terhadap total dewan komisaris.

$$\text{Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Wanita}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \quad (3.4)$$

### 3.1.2.4 Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit merupakan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Skala yang digunakan untuk ukuran komite audit adalah rasio. Indikator ukuran komite audit yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proporsi jumlah anggota komite audit suatu perusahaan terhadap jumlah minimal anggota komite audit sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Tahun 2004. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Tahun 2004, komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-

kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

$$Ukuran\ Komite\ Audit = \frac{Jumlah\ Anggota\ Komite\ Audit}{3} \quad (3.5)$$

### 3.1.2.5 Komite Audit Independen

Komite audit independen menunjukkan proporsi komisaris independen dalam susunan komite audit. Skala yang digunakan untuk komite audit independen adalah rasio. Indikator komite audit independen yang digunakan dalam penelitian ini konsisten dengan Said, *et al.* (2009) yaitu jumlah komite audit independen terhadap total anggota komite audit.

$$Komite\ Audit\ Independen = \frac{Jumlah\ Komite\ Audit\ Independen}{Total\ Anggota\ Komite\ Audit} \quad (3.6)$$

### 3.1.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) (Tarjo, 2008). Skala yang digunakan untuk kepemilikan institusional adalah rasio. Indikator kepemilikan institusional yang digunakan dalam penelitian ini konsisten dengan Novita dan Djakman (2008), Murwaningsari (2009), dan Nurkhin (2009) yaitu proporsi jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total jumlah lembar saham yang beredar.

$$Kepemilikan\ Institusional = \frac{Jumlah\ lembar\ saham\ yang\ dimiliki\ oleh\ investor\ institusi}{Total\ Jumlah\ lembar\ saham\ yang\ beredar} \quad (3.7)$$

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

No.	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Keterangan
1.	<u>Variabel Dependen (Y)</u> Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Jumlah item yang diungkapkan perusahaan/jumlah item yang diharapkan perusahaan sesuai dengan GRI	Rasio	$CSDI = V/79$
2.	<u>Variabel Independen (X)</u> a. Ukuran Dewan Komisaris  b. Komisaris Independen  c. Proporsi wanita dalam dewan komisaris  d. Ukuran Komite Audit  e. Komite Audit Independen  f. Kepemilikan Institusional	Proporsi jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan terhadap jumlah minimal anggota dewan komisaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 5  Proporsi komisaris independen terhadap total dewan komisaris  Proporsi komisaris wanita terhadap total dewan komisaris  Proporsi jumlah anggota komite audit suatu perusahaan terhadap jumlah minimal anggota komite audit sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Tahun 2004.  Proporsi komite audit independen terhadap total anggota komite audit  Proporsi jumlah kepemilikan saham oleh institusi terhadap total jumlah lembar saham yang beredar	Rasio  Rasio  Rasio  Rasio  Rasio	Ukuran Dewan Komisaris = Jumlah Anggota Dewan Komisaris/2  Komisaris Independen = Jumlah Komisaris Independen/Total Anggota Dewan Komisaris  Proporsi Wanita dalam Dewan Komisaris = Jumlah Komisaris Wanita/Total Anggota Dewan Komisaris  Ukuran Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit/3  Komite Audit Independen = Jumlah Komite Audit Independen/Total Anggota Komite Audit  Kepemilikan Institusional = Jumlah Lembar Saham yang dimiliki oleh Institusi/Total Jumlah Lembar Saham yang Beredar

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini

## 3.2 Populasi dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah perusahaan *high profile* yang terdaftar (*go public*) di Bursa Efek Indonesia seperti yang tercantum dalam *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) 2009. Perusahaan *high profile* yang terdaftar (*go public*) di Bursa Efek Indonesia digunakan sebagai populasi karena perusahaan tersebut mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada pihak luar perusahaan, sehingga memungkinkan laporan tersebut diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu, menurut Robert (1992), perusahaan *high profile* merupakan perusahaan yang lebih sensitif terhadap lingkungan, memiliki risiko politik yang lebih tinggi, atau tingkat persaingan yang ketat.

Perusahaan yang termasuk dalam kategori *high profile* dimana perusahaan tersebut digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan pertambangan, kimia, perhutanan dan agribisnis, kertas, otomotif, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, kesehatan, pariwisata, *infrastructure*, *utilities* dan transportasi, *engineering*, dan teknologi informasi (Hackston dan Mine, 1996; Sembiring, 2003). Jumlah perusahaan *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan data yang terdapat pada *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) 2009 yaitu 179 perusahaan.

### 3.2.2 Sampel

Dari 179 perusahaan *high profile* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) 2009, penentuan jumlah minimal sampel yang diperlukan agar hasilnya dapat representatif dengan jumlah populasi yang ada digunakan rumus berikut (Hasibuan, 2001 dalam Sembiring, 2003):

$$n = \frac{N.pq}{(N-1)D + pq} \quad (3.6)$$

$$D = \frac{B^2}{4} \quad (3.7)$$

Dimana:

N = populasi

n = jumlah sampel

p = probabilitas untuk meminimumkan *sampling error*, digunakan 0.5

q = (1-p) = 0.5

B = *bound of error* yang diperkirakan tidak lebih dari 10%

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut di atas maka diperoleh jumlah minimal sampel perusahaan 64 perusahaan. Jumlah sampel ini belum representatif karena Sekaran (2000) dalam Sembiring (2003) menyatakan bahwa dalam analisis regresi berganda, ukuran sampel hendaknya minimal sepuluh kali dari jumlah variabel dalam penelitian. Oleh karena itu, jumlah sampel pada penelitian ini sama dengan jumlah populasi pada penelitian ini yaitu 179 perusahaan.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Selain itu, penggunaan metode *purposive sampling* bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi dari kelompok sasaran yang spesifik (Sekaran, 2003). Kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel yaitu:

- a. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009.
- b. Perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan *high profile*. Perusahaan *high profile* yaitu perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan pertambangan, kimia, perhutanan dan agribisnis, kertas, otomotif, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, kesehatan, pariwisata, *infrastructure, utilities* dan transportasi, *engineering*, dan teknologi informasi (Hackston dan Mine, 1996; Sembiring, 2003).
- c. Perusahaan menyajikan laporan tahunan periode 2009.
- d. Data-data yang berkaitan dengan variabel- variabel penelitian tercantum dalam laporan tahunan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) untuk tahun 2009. Pertimbangan penggunaan data sekunder yaitu penelitian sebelumnya menggunakan jenis data sekunder (Hackston dan Milne, 1996; Sembiring, 2003; Huafang dan Jianguo, 2007; Sulastini, 2007; Novita dan Djakman, 2008; Handajani, *et al.*, 2009;

Murwaningsari, 2009; Nurkhin, 2009; Said, *et al.*, 2009; Khan, 2010) dan jenis data sekunder lebih dapat dipercaya keabsahannya karena data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi entah di dalam atau di luar organisasi, semua yang dapat berguna bagi peneliti. Data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan, data sensus, Ikhtisar Statistik, dan sebagainya (Sekaran, 2003; Munif, 2010). Penggunaan laporan tahunan yang hanya satu tahun penelitian yaitu tahun 2009 didasarkan pada pertimbangan bahwa data tersebut relatif baru, sehingga dapat menunjukkan praktik pengungkapan sosial dan lingkungan saat ini. Selain itu, biasanya kebijakan pengungkapan sosial dan lingkungan cenderung untuk konstan sepanjang tahun (Botosan, 1997).

Pertimbangan penggunaan bagian naratif dari laporan tahunan tersebut didasarkan pada penelitian sebelumnya telah ditemukan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan cenderung bersifat kualitatif dan tersebar di bagian nonkeuangan dalam laporan tahunan seperti Ikhtisar Keuangan, Laporan dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, Analisis dan Pembahasan Manajemen, Laporan *Corporate Governance*, dan Laporan *Corporate Social Responsibility*, serta Catatan atas Laporan Keuangan (Hackston dan Milne, 1996; Sembiring, 2003; Sulastini, 2007; Branco dan Rodrigues, 2008; Novita dan Djakman, 2008; Handajani, *et al.*, 2009; Nurkhin, 2009; Said, *et al.*, 2009; Khan, 2010). Sedangkan data mengenai ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran komite audit, komite audit

independen, dan kepemilikan institusional dapat ditemukan dalam laporan tahunan. Data sekunder tersebut diperoleh dari situs BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan penelusuran data sekunder melalui metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

### **3.5 Metode Analisis**

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2007).

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian regresi berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut antara lain tidak ada multikolinearitas yang sempurna antar variabel bebas, tidak ada autokorelasi antar kesalahan, homoskedastisitas, dan harus terdistribusi secara normal.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedisitas, dan uji normalitas

sebelum melakukan pengujian hipotesis. Berikut ini penjelasan uji asumsi klasik yang akan digunakan. Akan tetapi, pada penelitian ini tidak dilakukan uji autokorelasi. Hal ini dikarenakan periode penelitian ini hanya satu tahun.

### 3.5.2.1 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya (Ghozali, 2007).

Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $> 10$  maka terdapat multikolinearitas yang tidak dapat ditoleransi dan variabel tersebut harus dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh tidak bias.

### 3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (homoskedastisitas) (Ghozali, 2007).

Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplots*. Apabila dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak (tanpa pola yang jelas) serta tersebar di atas maupun

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Sebaliknya, jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

### 3.5.2.3 Uji Normalitas

Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali, 2007).

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik histogram dan *normal probability plots*. Dalam grafik histogram, normalitas dilihat dari distribusi data pengamatan mendekati distribusi data yang normal. Sedangkan, normalitas dalam *probability plots* dilihat dari plotting data residual yang menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis lurus diagonalnya. Selain itu, pengujian analisis juga dapat dilakukan dengan uji statistik yaitu menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Data dinyatakan terdistribusi secara normal jika variabel-variabel tersebut memiliki *p value (probability value) > 0,05*.

### 3.5.2.4 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis yang digunakan untuk menilai variabilitas luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran komite audit, komite audit independen, dan kepemilikan institusional terhadap variabel dependen pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{CSD} = \alpha_0 - \beta_1 \text{UDK} + \beta_2 \text{DKI} + \beta_3 \text{PWDC} + \beta_4 \text{UKA} + \beta_5 \text{KAI} + \beta_6 \text{KI} + \varepsilon \quad (3.8)$$

Keterangan:

CSD = indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

$\alpha_0$  = *intercept*

$\beta$  = koefisien regresi model

UDK = ukuran dewan komisaris

DKI = komisaris independen

PWDC = proporsi wanita dalam dewan komisaris

UKA = ukuran komite audit

KAI = komite audit independen

KI = kepemilikan institusional

$\varepsilon$  = *error term*

### **3.5.3 Uji Hipotesis**

#### **3.5.3.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2007).

#### **3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2007). Pengambilan keputusannya adalah apabila *p value (probability value)*  $< 0.05$ , maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

#### **3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2007). Pengambilan keputusannya adalah apabila *p value*

(*probability value*) < 0.05, maka suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kegiatan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penelusuran laporan tahunan perusahaan sampel dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Melakukan *checklist* atas item-item yang diungkapkan oleh perusahaan berdasarkan indikator GRI.
  - b. Menghitung jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan berdasarkan indikator GRI.
  - c. Menghitung indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan membagi jumlah item yang diungkapkan perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan sesuai dengan indikator GRI.
2. Melakukan pencatatan variabel dependen (indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan) dan variabel independen (ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran komite audit, komite audit independen, dan kepemilikan institusional).
3. Melakukan penyesuaian antara pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan variabel independen, serta melakukan transformasi data apabila diperlukan.
4. Menguji pengaruh variabel independen (ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, proporsi wanita dalam dewan komisaris, ukuran komite

audit, komite audit independen, dan kepemilikan institusional) terhadap indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menggunakan uji regresi dengan taraf signifikansi 0,05 secara simultan dan parsial.